

ILLEGAL LOGGING IN TANJUNG PUTING NATIONAL PARK

An Update on The Final Cut Report

PENEBANGAN LIAR DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

Update Laporan 'Final Cut'



If a government ignores its true assets and lets them be plundered by criminals and thieves then it ignores the very basis of civil society

Introduction

Orangutans are disappearing, their forest homes are being destroyed, and scientists are raising their status to 'endangered'. Why should we care? The answer is, of course, that every high profile species such as an orangutan is our indicator of the ecological health of the area in which it lives. The plight of the few remaining orangutans, Asia's only great ape, tells us that Indonesia's forests are sick. Sick with corruption, money-politics, greed, violence, and self-interest. And the sad fact, borne out by the inaction of President Wahid's government, is that nobody seems to have the courage to care.

The forests of Indonesia provide valuable resources to local communities, to wildlife that can generate valuable future income, and to regional and national treasuries through tariffs and taxes. The forests protect the land from erosion and play a vital role in the provision of fresh water. If a government ignores its true assets and lets them be plundered by criminals and thieves – even if some of these are powerful people – then it ignores the very basis of civil society.

The situation is so serious that credible estimates of illegal logging in Indonesia suggest that 70 per cent of timber supplied to the processing sector comes from illegal logging. This means that 70 per cent of the industry avoids taxes and tariffs while uncontrollably denuding vast tracts of land. One and half million hectares of forest has been cleared every year for the past 15 years according to recent estimates from new mapping data.

In August 1999 EIA and Telapak Indonesia published 'The Final Cut', launched a campaign and showed the commercial illegal logging of Tanjung Puting National Park to millions of television viewers in Indonesia and around the world. This world-renowned area is the only protected area for orangutans in Central Kalimantan. We named the culprits. We provided dossiers to the police and the Ministry of Forestry and Estate Crops. We returned to Tanjung Puting on a further six investigations after the launch. We presented the evidence to the then Governor of the province.

The international donor community through the Consultative Group on Indonesia raised the issue with our evidence at an important seminar in January 2000. The national and international media continued to show considerable interest in the issue with some Indonesian journalists carrying out their own investigations. When EIA and Telapak

Pengantar

Orangutan menuju kepunahan, hutan yang menjadi 'rumah' mereka semakin menyusut, dan para ilmuwan mengangkat status kerentanan mereka menjadi 'terancam punah'. Mengapa kita harus peduli? Tentu saja, jawabannya adalah bahwa semua spesies besar seperti orangutan adalah indikator kesehatan ekologis dari kawasan tempat tinggal mereka. Kondisi buruk dari orangutan – satu-satunya kera besar di Asia – yang tersisa, menunjukkan bahwa hutan Indonesia dalam keadaan rusak. Rusak karena korupsi, politik uang, kerakusan, praktek-praktek kekerasan, dan egoisme pribadi. Dan fakta yang menyedihkan, tampak dari kepasifan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, adalah bahwa tak seorang pun memiliki keberanian untuk peduli.

Hutan Indonesia menyediakan sumberdaya berlimpah untuk komunitas lokal, untuk kehidupan liar yang bisa menghasilkan rezeki berlimpah pada masa depan, dan untuk kekayaan daerah dan nasional melalui tarif dan pajak. Hutan melindungi tanah dari erosi dan memainkan peranan penting sebagai pemasok air bersih. Bila suatu pemerintahan mengabaikan asetnya dan membiarkannya dijarah – yang justru biasanya adalah orang-orang yang berkuasa – maka ia telah mengabaikan prinsip-prinsip masyarakat sipil yang paling dasar.

Situasi kehutanan Indonesia sangat gawat karena perkiraan yang bisa dipercaya mengenai penebangan liar di Indonesia menunjukkan bahwa 70% kayu yang dipasok ke sektor pengolahan berasal dari penebangan liar. Ini berarti bahwa 70% dari industri itu menghindari pajak dan tarif, dan sementara itu, telah terjadi penggundulan hutan tanpa kendali secara besar-besaran. Satu setengah juta hektar hutan ditebang tiap tahun dalam 15 tahun terakhir menurut perkiraan terakhir dari data pemetaan baru.

Pada bulan Agustus 1999 EIA dan Telapak Indonesia menerbitkan 'The Final Cut', melancarkan kampanye dan menyiarkan praktek penebangan liar berskala komersial di Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Gunung Leuser kepada jutaan penonton televisi di Indonesia dan di seluruh dunia. Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal di dunia itu merupakan satu-satunya kawasan lindung bagi orangutan di Kalimantan Tengah. Kami membeberkan nama para pelaku penebangan liar. Kami memberikan



personnel were viciously assaulted, threatened with murder and prevented from leaving Pangkalanbun in early 2000 the world was given a snapshot of why the park is being blatantly destroyed in front of officials and the government. Many local officials have been bought.

World opinion of Central Kalimantan is deservedly at an all time low. The province is so controlled by corruption that the main timber thief has been elevated to represent its people in the highest parliamentary body in Indonesia – the Peoples' Consultative Assembly (MPR).

The fate of Tanjung Puting is a test case for a government that claims to be committed to fighting corruption and has made promises to its international donors that it will tackle illegal logging immediately, especially in National Parks. There is no question of what is happening, no question of who is behind it, and no question of the lawlessness it creates. The only question is whether the government has the courage to move in.

Tanjung Puting provides an opportunity for this government to hold the timber baron accountable, root out local corruption and provide a future for the local communities. If they can't do that in Tanjung Puting where the issues are relatively clear, then Indonesia's precious forest resources have no future. Asia's only great ape is warning us all – act now or it will be too late.

nama-nama tersebut kepada pihak Kepolisian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Setelah peluncuran kampanye, kami kembali melakukan enam kali investigasi di Tanjung Puting, dan memaparkan bukti-bukti yang ditemukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah pada masa itu.

Dalam seminar *Consultative Group on Indonesia* (CGI) pada bulan Januari 2000, komunitas donor internasional mengangkat isu ini dengan bukti-bukti temuan kami. Media nasional dan internasional semakin menunjukkan minat yang besar terhadap isu ini. Sejumlah wartawan Indonesia bahkan melakukan penyelidikan mereka sendiri. Ketika personil EIA dan Telapak dianiaya, diancam dan dicegah agar tidak meninggalkan Pangkalanbun pada awal 2000, dunia disuguhi tayangan sekilas tentang mengapa taman nasional itu dihancurkan secara terang-terangan di hadapan aparat dan pejabat pemerintah. Banyak pejabat daerah yang sudah dibeli.

Tidaklah mengherankan bila pandangan dunia terhadap Kalimantan Tengah menjadi sangat buruk. Propinsi itu begitu dikuasai oleh iklim korupsi, mengingat si penjarah kayu nomor wahid justru terpilih mewakili rakyat daerah itu sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Nasib Tanjung Puting menjadi batu ujian bagi pemerintah, yang mengaku memiliki komitmen untuk memberantas korupsi dan telah berjanji kepada lembaga-lembaga donor internasional untuk secepatnya menghentikan penebangan liar, terutama di Taman-Taman Nasional. Tidak perlu dipertanyakan tentang apa yang terjadi, siapa tokoh yang berada dibelakangnya, dan tidak perlu didiskusikan tentang ketiadaan hukum yang tercipta. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah pemerintah memiliki keberanian untuk bertindak.

Tanjung Puting memberikan kesempatan bagi pemerintahan ini untuk menangkap sang raja penjarah kayu, membasmi korupsi di tingkat lokal dan memberikan masa depan bagi masyarakat setempat. Bila mereka tidak mampu melakukannya di Tanjung Puting, di mana masalahnya relatif jelas, maka tiada lagi masa depan bagi sumberdaya hutan Indonesia yang begitu berharga. Orangutan, satu-satunya spesies kera besar Asia memberikan peringatan kepada semua kita – segeralah bertindak atau segala sesuatunya menjadi terlambat.

photo left

**Illegal logging in
Gunung Leuser
National Park**

**Penebangan liar
di Taman Nasional
Gunung Leuser**

Dave Currey
Director
The Environmental
Investigation
Agency

A. Ruwindrijarto
Executive Director
Telapak Indonesia

July 2000



© Dove Currey – EIA

photo above
Forest fires have devastated vast areas of Indonesia

Kebakaran hutan telah merusak kawasan yang luas sekali di Indonesia

Indonesia's Illegal Logging Epidemic

The Indonesian archipelago contains ten per cent of the world's tropical forest cover, providing vital habitat for a unique array of biodiversity⁽¹⁾. Yet the systematic plundering of these forests for short-term profit is accelerating the country towards an environmental catastrophe with devastating social implications.

Emerging evidence vividly demonstrates the perilous state of Indonesia's once abundant forests. Illegal logging, appalling management of forest concessions, conversion to plantations and annual forest fires are decimating the rainforest, and forcing keystone species such as the orangutan and Sumatran tiger to the brink of extinction. Forest dependent communities are rapidly losing their future natural resources. At the present rate of logging the country's production forests will be exhausted within two decades.⁽²⁾

The World Bank in Jakarta estimates that between 1985 and 1997 Indonesia lost an average of 1.5 million hectares of forest cover every year – much higher than previously thought – and there are now only around 20 million hectares of quality production forest left.⁽³⁾

The consumption of roundwood in

Epidemi Penebangan Liar di Indonesia

Sepuluh persen dari hutan tropis dunia berada di Indonesia, dan menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati yang unik⁽¹⁾. Meski demikian, penggundulan hutan yang sistematis demi keuntungan jangka pendek, mempercepat kehancuran lingkungan hidup Indonesia dengan dampak sosial yang dahsyat.

Bukti-bukti baru secara gamblang menunjukkan betapa parahnya kondisi hutan Indonesia, yang dahulu begitu lebat. Penebangan liar, pengelolaan konsesi hutan yang sangat jelek, perubahan hutan menjadi perkebunan dan kebakaran hutan setiap tahun membuat hutan tropik kian menyusut, dan mendesak spesies-spesies unik macam orangutan dan harimau Sumatra ke jurang kepunahan. Komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan dengan cepat kehilangan sumberdaya alam masa depan mereka. Dengan tingkat penebangan kayu seperti sekarang, hutan produksi negara akan habis dalam dua dekade.⁽²⁾

Bank Dunia di Jakarta meramalkan bahwa antara 1985 dan 1997, Indonesia kehilangan rata-rata 1,5 juta hektar kawasan hutan tiap tahun – jauh lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya – dan sekarang, hanya tersisa

Indonesia is now far in excess of official supply. In 1997 the gap between consumption and supply stood at 41 million cubic metres, but by 1998 it had grown to 56 million cubic metres. This deficit is accounted for by rampant illegal logging, which now provides around 70 per cent of timber supplied to the processing sector. The situation is so out of control that unlicensed, illegal sawmills have a total capacity double that of licensed mills.⁽⁴⁾

Analysis carried out by the World Bank shows that the vital lowland dry forest type is suffering most from the onslaught. This forest type has virtually been logged out in Sulawesi, and could disappear from Sumatra by 2005 and Kalimantan by 2010.⁽⁵⁾ These lowland forests provide vital habitat for a host of endangered species. Tanjung Puting National Park is the only protected lowland forest in Central Kalimantan and yet even this area has now become a rich source of commercial illegal logs.

Although much of the responsibility for Indonesia's forest crisis rests with former President Suharto and his coterie of family members and close business cronies, there has been an upsurge in illegal logging since he was removed from power. New, more locally based and powerful timber barons are emerging using the same methods of corruption and violence to increase their wealth. As with their predecessors, they are backed by officials and the military, but use the new government's decentralisation policy to their advantage. Some have already bought members of local parliaments and are responsible for corrupting policies designed to support local communities. The losers are, once again, the local people, the forests and the wildlife.

Other sources confirm a dramatic upsurge in illegal logging. In 1998 the value of teak timber stolen in Java was seven times greater than in the previous year.⁽⁶⁾ The Centre for International Forestry Research (CIFOR) notes that while illegal logging has boomed during the economic crisis, the factors driving it pre-date the economic downturn.

CIFOR's analysis of the impact of the economic and political upheaval on the Indonesian forest sector concludes: 'The country's natural forests are under serious threat, and the threat pre-dates the economic crisis. Excess processing capacity by the timber industry, over-commitment to production at the expense of conservation and insufficient forest access rights at the local level are the key policy issues, as they were long before the crisis.'⁽⁷⁾

The situation has deteriorated to such an



Sawmill processing illegal timber, northern Sumatra

Sawmill mengolah kayu curian, Sumatra bagian utara

© A. Ruwidiarto - EIA/Telapak

sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang cukup baik.⁽³⁾

Konsumsi kayu gelondongan di Indonesia saat ini jauh melebihi persediaan dari sumber-sumber resmi. Pada 1997, selisih antara konsumsi dan pasokan adalah 41 juta meter kubik, tetapi pada 1998, selisih tersebut membengkak menjadi 56 juta meter kubik. Defisit ini disebabkan oleh penebangan liar secara serampangan, yang sekarang memasok 70 persen kayu bagi sektor pengolahan. Situasi ini begitu tak terkendali. Sampai-sampai, total kapasitas *sawmill* kayu liar dan tak berizin adalah dua kali lipat dibandingkan *sawmill* kayu resmi.⁽⁴⁾

Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa jenis hutan kering dataran rendahlah yang paling menderita akibat penghancuran tersebut. Jenis hutan ini sudah habis digunduli di Sulawesi, dan bisa lenyap dari Sumatra pada 2005 dan Kalimantan pada 2010.⁽⁵⁾ Hutan dataran rendah ini merupakan habitat pokok untuk spesies langka. Taman Nasional Tanjung Puting adalah satu-satunya hutan dataran rendah yang dilindungi di Kalimantan Tengah dan sekarang justru menjadi sumber kayu komersial liar yang berlimpah.

Kendatipun sebagian besar dari tanggung jawab atas krisis hutan di Indonesia ada di pundak mantan Presiden Suharto dan lingkaran

Illegal logging now provides around 70 per cent of timber supplied to the processing sector



© A. Ruwindijarto – EIA/Telopak

photo above
Illegal logging
accounts for 70 per
cent of timber
processed in
Indonesia

70 persen kayu olahan
di Indonesia berasal
dari penebangan liar

extent that even the forestry industry in Indonesia, long characterised by malpractice and corruption, is calling for action. The wood panel industry association (APKINDO) claims that annual official exports of logs to China, Malaysia and Hong Kong have fallen by one million cubic metres in a year due to sales of cheap illegal timber from Kalimantan and Sumatra.⁽⁸⁾

National Parks in Crisis

As a consequence of such rampant illegal logging even so called protected National Parks are being devastated. These parks offer the last refuge for many endangered species, yet many are being logged on a commercial scale, often with the connivance of the local authorities

anggota keluarga serta kroni bisnisnya, telah terjadi kenaikan dalam skala penebangan liar sejak ia digusur dari kekuasaan. Cukong-cukong kayu dari berbagai daerah, bermunculan dengan menggunakan metode korupsi dan kekerasan yang sama untuk menambah kekayaan mereka. Sebagaimana para pendahulunya, mereka juga dibekingi oleh pejabat, sipil maupun militer. Selain itu mereka memanfaatkan kebijakan desentralisasi untuk keuntungan sendiri. Beberapa orang telah menyogok anggota DPRD dan bertanggung jawab atas tindakan mengkorupsi kebijakan yang dirancang untuk mendukung masyarakat lokal. Yang menjadi korban lagi-lagi adalah rakyat setempat, hutan dan hidupan liar.

Sumber-sumber lain mengkonfirmasi kenaikan luar biasa dalam penebangan liar. Pada 1998, nilai kayu jati yang dicuri di Jawa adalah tujuh kali lebih besar daripada tahun sebelumnya.⁽⁶⁾ Centre for International Forestry Research (CIFOR) mencatat bahwa meskipun penebangan liar meningkat drastis sejak krisis, faktor-faktor pendorongnya telah ada sebelum krisis ekonomi.

Analisis CIFOR mengenai dampak gonjangan ekonomi dan politik terhadap sektor kehutanan di Indonesia menyimpulkan: 'Hutan alam Indonesia menghadapi ancaman serius, dan ancaman itu telah ada sebelum krisis ekonomi. Kapasitas pengolahan yang berlebihan oleh industri perkayuan, sikap mendahulukan produksi yang keterlaluan dengan mengorbankan konservasi serta hak atas hutan yang tidak memadai pada tingkat lokal merupakan isu kebijakan pokok, yang telah ada jauh sebelum krisis.'⁽⁷⁾

Sedemikian parahnya situasi ini, sampai-sampai industri kehutanan di Indonesia, yang terkenal karena salah kelola dan korupsi, menyerukan untuk mengambil tindakan. Asosiasi Pengusaha Kayu Lapis Indonesia (APKINDO) mengklaim bahwa ekspor tahunan kayu gelondongan ke Cina, Malaysia dan Hong Kong anjlok satu juta meter kubik dalam satu tahun akibat penjualan kayu ilegal dari Kalimantan dan Sumatra.⁽⁸⁾

Taman Nasional dalam Krisis

Sebagai konsekuensi penebangan liar yang merajalela itu, Taman Nasional yang dilindungi pun mengalami kerusakan parah. Kawasan lindung bagi spesies langka ini, banyak yang rusak karena kayu-kayunya ditebangi untuk kemudian dijual. Bahkan tidak jarang terjadi persekongkolan dengan petugas setempat yang

charged with protecting the forest. Up to half of National Park managers in Indonesia report recent increased encroachment in their areas, while budgets for protected areas have fallen in real terms every year since 1996.⁽⁹⁾

EIA and Telapak Indonesia have highlighted blatant illegal logging in both Tanjung Puting and Gunung Leuser National Parks. Further reports of illegal logging have since flooded in from areas in West Papua, Gunung Palang National Park in West Kalimantan, Kerinci-Seblat National Park in Sumatra and in many others.

Left unchecked the massive theft of timber will have dire consequences for Indonesia – increased deforestation, dwindling wildlife, loss of vital state and local revenue, and a climate of corruption and lawlessness. It presents one of the greatest challenges to the government of President Wahid, the country's first democratically-elected leader for over 30 years.

The Government's response – words but little action

The main improvement in dealing with illegal logging has been in the form of greater transparency by the government of President Wahid. This has allowed open discussion of the issues between Ministries, NGOs and the international community. Greater press interest in these issues has resulted from this remarkable change. Yet there has been little effective action to date.

bertugas melindungi hutan. Baru-baru ini, setengah dari pejabat pengelola Taman Nasional melaporkan meningkatnya pelanggaran batas dalam kawasan mereka, sementara itu anggaran untuk kawasan yang dilindungi semakin merosot dari tahun ke tahun sejak 1996.⁽⁹⁾

EIA dan Telapak Indonesia telah menyoroti penebangan liar terang-terangan di Taman Nasional Tanjung Puting dan Gunung Leuser. Semenjak kampanye itu diluncurkan, laporan-laporan lebih jauh mengenai penebangan liar terus mengalir dari berbagai kawasan, yaitu dari Papua Barat, Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat, Taman Nasional Kerinci-Seblat di Sumatra dan di berbagai tempat lainnya.

Pencurian kayu besar-besaran yang tak tertangani akan berdampak mengerikan bagi Indonesia – meningkatnya penggundulan hutan, menyusutnya hidupan liar, hilangnya pendapatan vital bagi negara dan daerah, dan suburnya iklim korupsi serta ketiadaan hukum. Inilah salah satu tantangan terbesar pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis sejak lebih dari 30 tahun terakhir.

Tanggapan Pemerintah – banyak bicara sedikit tindakan

Kemajuan utama dalam menangani penebangan liar adalah dalam bentuk transparansi yang

Budgets for protected areas have fallen in real terms every year since 1996



photo left
Protest against timber theft, Jakarta
Protes terhadap pencuri kayu, Jakarta

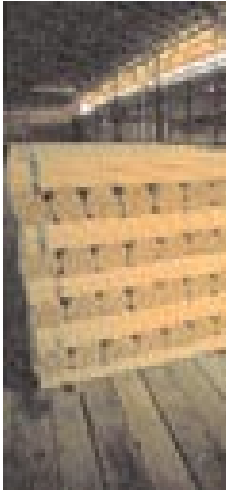


photo above

Wood from Central Kalimantan's forests, turned into broom handles for export markets

Kayu dari hutan Kalimantan Tengah, menjadi gagang sapu untuk pasar ekspor

'Illegal logging is a problem that must be addressed. I see it as a test case of governance for the new Indonesian government'

Poul Nielson,
European
Commissioner for
Development and
Humanitarian Aid,
December 1999

Indonesian NGOs and the international community have attempted to bring pressure to bear on the Indonesian government. The European Union's Commissioner for Development and Humanitarian Aid was explicit during a visit to Jakarta in December: 'Illegal logging is a problem that must be addressed. I see it as a test case of governance for the new Indonesian government – whether or not they are able to do something real about this problem,' he said. ⁽¹⁰⁾

The Consultative Group on Indonesia, comprised of international donor agencies, persuaded the government to participate in an unprecedented forestry seminar, held in Jakarta in January 2000. Unfortunately all but one of the Indonesian cabinet members attending the meeting left after the opening session.

As a result of the seminar the Indonesian government agreed to immediately establish an Interdepartmental Committee on Forestry. It took four months for the committee to be agreed and to date it has not met. The government also stated it would take immediate action to 'impose strong measures against illegal loggers, especially those operating within National Parks, and closure of illegal sawmills'. ⁽¹¹⁾ But illegal loggers are still active in National Parks, including Tanjung Puting in Central Kalimantan and Gunung Leuser in northern Sumatra. Illicit sawmills in both these areas are also operating with impunity.

Yet some sporadic actions have been launched against the timber thieves, mostly under the authority of Mr Suripto, Secretary General at the Ministry of Forestry and Estate Crops (MOFEC). Little concrete change has emerged from his actions other than the high profile arrest and detention of Suharto crony, Mohamad 'Bob' Hasan. Some seizures have occurred, but illegal logging and the trafficking of these logs remains seriously out of control.

Suripto is reported to be working under extraordinarily difficult circumstances, with most Ministry officials blocking him from accessing information. There are rumours of death threats made to him by military commanders, warning him away from their patch. ⁽¹²⁾ The Minister announced that they had learned of a bribery fund that had been put together by leading timber barons to destabilise the efforts of the Ministry to combat illegal activities. ⁽¹³⁾

In February Suripto visited the Tanjung Puting National Park area and launched investigations into Abdul Rasyid, the timber baron. In April Suripto spearheaded an

lebih besar oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sikap ini memungkinkan diskusi terbuka mengenai isu-isu antara berbagai Departemen, LSM dan komunitas internasional. Minat pers yang besar terhadap isu-isu ini muncul akibat perubahan besar tersebut. Kendati demikian, masih sedikit tindakan yang benar-benar dilakukan.

LSM-LSM Indonesia dan komunitas internasional telah berupaya menekan pemerintah Indonesia. Komisioner Uni Eropa untuk Bantuan Pembangunan dan Kemanusiaan mengungkapkannya dalam sebuah kunjungan ke Jakarta bulan Desember: "Penebangan liar adalah masalah yang harus ditangani. Menurut saya itu merupakan ujian terhadap pemerintah Indonesia yang baru – apakah mereka mampu atau tidak melakukan tindakan nyata dalam menghadapi masalah ini," ujarnya. ⁽¹⁰⁾

Consultative Group on Indonesia, terdiri dari lembaga-lembaga donor internasional, mendorong pemerintah untuk berpartisipasi dalam sebuah seminar kehutanan, yang baru pertama kali terjadi, yang diselenggarakan di Jakarta pada Januari 2000. Sayang, dari anggota-anggota kabinet yang diundang, hanya satu orang menteri yang tetap bertahan hingga akhir seminar, selebihnya keluar ruangan segera setelah sesi pembukaan.

Sebagai hasil seminar itu, pemerintah Indonesia setuju untuk selekasnya membentuk sebuah Komisi Antar-Departemen untuk Masalah Kehutanan. Perlu waktu empat bulan untuk terbentuknya komisi itu dan hingga kini belum ada pertemuan. Pemerintah juga menyatakan akan mengambil langkah segera untuk 'menerapkan tindakan tegas terhadap penebang liar, terutama yang beroperasi di dalam Taman Nasional, dan menutup sawmill kayu liar.' ⁽¹¹⁾ Tetapi, penebang liar masih beraksi di dalam Taman Nasional, termasuk Tanjung Puting di Kalimantan Tengah dan Gunung Leuser di Sumatra bagian utara. Seakan-akan kebal hukum, sawmill liar di kedua kawasan itu juga masih beroperasi.

Meski demikian, tindakan-tindakan sporadis telah dilakukan untuk menghadapi para pencuri kayu, terutama di bawah koordinasi Suripto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Perkebunan. Selain penahanan mantan pejabat tinggi dan kroni Suharto, Mohamad 'Bob' Hasan, hanya sedikit terjadi perubahan nyata dari tindakan-tindakannya. Langkah-langkah tegas telah dilakukan, tapi penebangan liar dan pengangkutan kayu-kayu curian tersebut tetap



© Dave Currey – EIA

investigation into the smuggling of logs from East Kalimantan to the Malaysian province of Sabah. The enquiry implicated security personnel on both sides of the border in smuggling around 100,000 cubic metres of timber every month, but the attempted crackdown failed as word of the covert operation was leaked. Suropto has publicly claimed that illegal logs are moved from Jambi in Sumatra to west Malaysia, from West Kalimantan to Sarawak, and from West Papua to China.⁽¹⁴⁾

Increasingly frustrated by official complicity in the timber theft, Indonesian activists and students are attempting to stem the tide of illegal logging. In May students held four government officials at the port of Pontianak, West Kalimantan, after the customs, navy, port authority and forestry department all failed to halt the departure of an illegal consignment of timber bound for Singapore. As a result of their actions the ship carrying 70 containers of illegal logs was forced to return to port and its cargo seized.⁽¹⁵⁾

International Responsibility

Responsibility for tackling the illegal logging crisis also rests with the international community, particularly the industrialised countries and China, which are the major

tidak bisa dihentikan.

Diberitakan bahwa Suropto bekerja di bawah tekanan amat berat, karena banyak pejabat di Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang menghalanginya untuk memperoleh informasi. Rumor menyebutkan bahwa ia diancam akan dibunuh oleh pejabat-pejabat militer, sebagai peringatan agar ia tidak menghalangi 'jalur' mereka.⁽¹²⁾ Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyatakan bahwa departemennya mengetahui adanya uang suap yang diberikan oleh cukong-cukong kayu papan atas untuk mendestabilisasi upaya membasmi aktivitas-aktivitas ilegal.⁽¹³⁾

Pada bulan Februari 2000, Suropto berkunjung ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan melakukan penyelidikan terhadap Abdul Rasyid, seorang pengusaha kayu. Selanjutnya pada bulan April, Suropto mengepalai penyelidikan penyelundupan kayu dari Kalimantan Timur ke Sabah, Malaysia. Penyelidikan itu mampu mengungkap keterlibatan personil keamanan dari kedua pihak di perbatasan, yang diduga menyelundupkan sekitar 100.000 meter kubik kayu setiap bulan. Namun tindakan tegas gagal dilakukan karena rencana tersebut telah dibocorkan terlebih dahulu. Kepada pers, Suropto mengatakan bahwa kayu liar diselundupkan dari Jambi di Sumatra ke Malaysia barat, dari Kalimantan Barat ke Sarawak, dan dari Papua Barat ke Cina.⁽¹⁴⁾

Para aktivis dan mahasiswa Indonesia, yang semakin frustrasi setelah mengetahui keterlibatan aparat dalam pencurian kayu, berupaya membendung penyelundupan kayu liar. Pada bulan Mei, para mahasiswa menahan empat pejabat pemerintah di pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, setelah Kantor Bea Cukai, Angkatan Laut, petugas pelabuhan dan Dinas Kehutanan gagal menyetop pengiriman kayu liar ke Singapura. Buah dari aksi para mahasiswa tersebut, kapal yang mengangkut 70 kontainer kayu liar dipaksa kembali ke pelabuhan dan muatannya disita.⁽¹⁵⁾

Tanggung Jawab Internasional

Tanggung jawab menghentikan krisis penebangan liar juga terletak pada komunitas internasional, terutama negara-negara industri dan Cina, yang merupakan konsumen utama kayu curian dari Indonesia. Kelompok negara-negara G8 ditambah anggota-anggota Uni Eropa mengimpor lebih dari separuh kayu yang diekspor dari Indonesia.⁽¹⁶⁾ Mayoritas kayu tersebut diperoleh dari penebangan liar di

photo left

Timber being unloaded at Tanjung Priok port, Jakarta

Bongkar muatan kayu di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Increasingly frustrated by official complicity in the timber theft, Indonesian activists and students are attempting to stem the tide of illegal logging

To date little of substance has emerged out of the G8's pronouncements and programmes

consumers of Indonesia's stolen timber. The G8 group of countries plus the European Union members import over half the timber exported from Indonesia.⁽¹⁶⁾ The majority of this timber has been illegally felled in Indonesia. Timbers such as *ramin*, which is the main target for illegal loggers operating in Tanjung Puting National Park, are almost solely intended for export from Indonesia.

The G8 has made a series of public commitments to tackle illegal logging, culminating in the formulation of an Action Programme on Forests in 1998, explicitly recognising the ecological damage caused by timber theft.⁽¹⁷⁾ The programme requires the G8 countries to share information as a first step towards developing counter measures against illegal logging, to assess their internal measures to control trade in illegal timber and to combat bribery and corruption in the forestry sector.

To date little of substance has emerged out of the G8's pronouncements and programmes. Meanwhile illegal logging in Indonesia continues unabated, with much of the stolen timber ending up on the markets of industrialised nations.

CITES Appendix III

There are very few mechanisms available to control the export, import and re-export of *ramin* and other timber species. However, the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) does provide legal and international mechanisms to attempt to regulate trade in flora and fauna. Indonesia and most consuming countries are party to CITES.

If *ramin* was placed on Appendix III of CITES, which can be done by simple notification by Indonesia to the CITES Secretariat, then all exports and imports of Indonesian *ramin* would have to be accompanied by a certificate of origin and an Indonesian CITES export permit. This mechanism is open to corruption and it would be recommended that, given the seriousness of the problem of illegal logging, Indonesia impose a zero quota on an Appendix III listing for at least two years.

Such a listing with a zero quota would make all exports of Indonesian *ramin* illegal, and very importantly, provide consuming countries with legal mechanisms through their own CITES implementing legislation to prevent import of illegal logs and products made from Indonesian *ramin*.

Indonesia. Kayu semacam *ramin*, yang merupakan sasaran utama para penebang liar yang beroperasi di Taman Nasional Tanjung Puting, hampir selalu menjadi komoditas ekspor Indonesia.

Negara G8 telah membuat serangkaian kesepakatan resmi untuk menghentikan penebangan liar, yang berpuncak dalam perumusan Program Aksi bagi Hutan tahun 1998. Dalam kesepakatan itu, mereka mengakui secara terbuka kerusakan ekologis akibat pencurian kayu.⁽¹⁷⁾ Program itu menyatakan bahwa negara-negara G8 harus saling memberi informasi sebagai langkah pertama ke arah perwujudan tindakan tegas terhadap penebangan liar, mempertimbangkan penerapan tindakan internal untuk mengawasi perdagangan kayu liar dan menggempur upaya penyuapan dan korupsi dalam sektor kehutanan.

Hingga hari ini pernyataan dan program G8 tersebut sedikit sekali membuahkan perubahan. Sementara itu, penebangan liar di Indonesia masih belum dapat dibasmi, dan banyak kayu curian tersebut masuk di pasar negara-negara industri.

CITES Appendix III

Sangat sedikit mekanisme untuk mengendalikan ekspor, impor dan re-ekspor (ekspor kembali) kayu *ramin* dan spesies kayu lainnya. Namun CITES (Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies-spesies yang Terancam Punah) memiliki seperangkat mekanisma legal dan internasional dalam upaya mengatur perdagangan flora dan fauna. Indonesia dan sebagian besar negara konsumen lainnya berpartisipasi dalam CITES.

Apabila *ramin* dimasukkan dalam CITES Appendix III, yang bisa dilakukan pihak Indonesia cukup dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Sekretariat CITES, maka semua ekspor dan impor *ramin* dari Indonesia akan harus disertai dengan sertifikat asal-usul dan ijin ekspor CITES Indonesia. Mekanisme ini terbuka untuk korupsi. Untuk itu disarankan, mengingat parahnya masalah penebangan liar, agar Indonesia menerapkan zero quota pada daftar Appendix III sedikitnya selama dua tahun.

Daftar zero quota akan membuat semua ekspor *ramin* dari Indonesia berstatus ilegal. Yang paling penting, akan memberikan negara konsumen mekanisme legal untuk penerapan legislasi CITES mereka dalam rangka mencegah impor kayu *ramin* ilegal dan produk-produk *ramin* buatan Indonesia.



Large areas in Tanjung Puting NP are seriously degraded
Suatu kawasan yang luas di TN Tanjung Puting berangsur rusak

The Continuing Destruction of Tanjung Puting National Park

In August 1999 EIA and Telapak Indonesia launched 'The Final Cut' report, documenting massive illegal logging in two of Indonesia's orangutan reserves – Tanjung Puting National Park in Central Kalimantan, and Gunung Leuser in northern Sumatra. ⁽¹⁸⁾

EIA/Telapak made eleven separate field investigations in the Tanjung Puting area. This park provides the only protected habitat for orangutans in Central Kalimantan, but was being devastated by blatant timber theft in full view of the authorities.

In the East of the park EIA/Telapak discovered an informal system of logging concessions and even witnessed a logging road being used to move stolen timber out of the reserve by truck. Along the Sekonyer River, where the park's tourist lodges and scientific research stations are found, a series of logging camps were supplying an almost continual flow of illegal timber, principally the profitable ramin logs.

EIA/Telapak tracked the stolen timber to unlicensed sawmills and steel barges in nearby Kumai Bay. Posing as timber buyers EIA/Telapak identified local timber baron Abdul Rasyid's Tanjung Lingga company as

Penghancuran Taman Nasional Tanjung Puting yang Berlanjut

Pada Agustus 1999 EIA dan Telapak Indonesia menerbitkan laporan 'The Final Cut', yang mendokumentasikan penebangan liar besar-besaran di dua kawasan perlindungan orangutan – Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dan Gunung Leuser di bagian utara Sumatra. ⁽¹⁸⁾

EIA/Telapak melakukan sebelas investigasi lapangan terpisah di kawasan Tanjung Puting. Taman Nasional ini merupakan satu-satunya habitat perlindungan orangutan di Kalimantan, namun dewasa ini sedang mengalami penghancuran teramat parah karena pencurian kayu secara terang-terangan di hadapan para pejabat pemerintah.

Di bagian timur Taman Nasional, EIA/Telapak menemukan suatu persekongkolan rahasia tentang pengaturan konsesi kayu dan bahkan menyaksikan sendiri jalur truk pengangkut kayu yang digunakan untuk membawa kayu curian ke luar kawasan lindung. Sepanjang Sungai Sekonyer, di mana terdapat tempat-tempat persinggahan turis dan stasiun penelitian ilmiah, terdapat pula tempat-tempat persinggahan kayu liar, terutama jenis ramin yang mahal harganya.

EIA/Telapak menelusuri jejak kayu curian

Destruction of Tanjung Puting



© Dave Currey – EIA/Telapak

photo above
Illegal timber in Kumai Bay
Kayu curian di Teluk Kumai

the major recipient of logs stolen from Tanjung Puting.

Since the revelations about Rasyid's leading role in the plunder of Tanjung Puting a series of dramatic events have unfurled. Rasyid has been able to consolidate his considerable political influence, at the local, provincial and even national level.

In January Tanjung Lingga staff assaulted and held hostage two EIA/Telapak campaigners who had been observing sawmill operations around Tanjung Puting. There have been a series of sporadic crackdowns by the authorities on both the loggers and sawmills, but Rasyid's operation remains unscathed and timber continues to be looted from the park.

The devastation of Tanjung Puting has emerged as a test as to whether the Indonesian government has the will to tackle the corruption and lawlessness permeating the country's forest sector.

Impact on Local Communities

It is true that many local people have joined outsiders in the looting of the Park. This clearly presents complicated issues for the authorities to deal with, especially in the midst of an economic crisis and a political policy of decentralisation.

The local towns of Pangkalanbun and Kumai are not stricken with abject poverty and many industries based on legal logging and tourism flourished prior to the accelerated destruction of the Park. Tourism is at an all time low because of the violence and lawlessness promoted by the illegal activities.

It is impossible for any government to

hingga ke unit-unit *sawmill* tak berizin dan tongkang-tongkang baja di dekat Teluk Kumai. Menyamar sebagai pembeli kayu, EIA/Telapak mengidentifikasi perusahaan Tanjung Lingga, milik cukong kayu Abdul Rasyid, sebagai pihak utama yang menampung kayu curian dari Tanjung Puting.

Sejak mengungkap peran utama Rasyid selaku penjarah Tanjung Puting, terjadilah serangkaian peristiwa dramatis. Rasyid mampu mengkonsolidasikan pengaruh politiknya yang kuat, pada tingkat lokal, propinsi bahkan nasional.

Bulan Januari, staf Tanjung Lingga menyandera dan menganiaya dua aktivis EIA/Telapak yang sedang mengamati unit *sawmill* kayu di sekitar Tanjung Puting. Pihak berwenang melakukan serangkaian tindakan tegas baik terhadap penebang maupun pengolah kayu, tapi bisnis Rasyid tetap berjalan mulus dan terus terjadi pencurian kayu di Taman Nasional itu.

Perusakan Tanjung Puting muncul sebagai ujian, apakah pemerintah Indonesia memiliki tekad untuk memberantas korupsi dan mengakhiri keadaan tanpa hukum yang telah merambat ke sektor kehutanan.

Dampak terhadap Masyarakat Lokal

Memang benar bahwa banyak warga setempat telah bergabung dengan orang luar untuk menjarah Taman Nasional itu. Jelas, kenyataan ini merupakan masalah rumit bagi pihak berwenang, terutama di tengah krisis ekonomi dan ketika pemerintah sedang melaksanakan kebijakan politik desentralisasi.

Sebelum terjadi pengrusakan Taman Nasional yang kian cepat, kota Pangkalanbun dan Kumai bukanlah kota yang miskin, telah ada cukup banyak industri kayu yang mengandalkan penebangan legal serta pariwisata yang telah berkembang. Saat ini sektor pariwisata justru menurun karena merebaknya kekerasan dan ketiadaan hukum yang didukung oleh aktivitas ilegal.

Mustahil bagi sebuah pemerintahan menggantikan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ilegal. Tetapi, pengrusakan cepat Taman Nasional itu sedang menghancurkan salah satu aset masyarakat lokal yang paling berharga dan merupakan aset masa depan yang penting. Keuntungan yang diperoleh hari ini sebagian besar masuk kantong cukong perkayuan dan para kroninya, dan ia akan beralih ke industri lain apabila sumberdaya ilegalnya habis. Sementara masyarakat lokal

picture right
Rasyid was nominated for the MPR by the local Golkar Party
Rasyid dicalonkan menjadi anggota MPR oleh Partai Golkar lokal

replace the income provided by an illegal activity. But the rapid destruction of the Park is destroying one of the local community's most valuable and important future local assets. The profits made today are largely in the hands of the timber baron and his cronies, and he will move on into other industries when his illegal resources are used up. The local community will not have that option.

Abdul Rasyid's hold on these communities is founded on lawlessness and corruption. There can be no future for ordinary citizens if such anarchy is allowed to flourish.

The Rise of Rasyid

Despite the evidence supplied by EIA and Telapak to the authorities regarding the activities of Abdul Rasyid, he has increased his influence and power. In the autumn of 1999 Rasyid continued to profit from the park's destruction and used his illicit wealth to further his political aspirations. In a meeting between EIA, Telapak and the then Governor of Central Kalimantan Rapiuddin Hamarung, it was made clear that the Governor was under pressure to award forest concessions to Abdul Rasyid. Immediate actions that followed this August 1999 meeting speak volumes:

- The Governor of Central Kalimantan awarded forest concessions to Abdul Rasyid;

PARTAI GOLKAR
KALIMANTAN TENGAH
Sekretariat : JALAN IMAM BONJOL No. 1 PALANGKA RAYA - 73112
P.O. BOX 20 TELP. (0536) 29677 - 21142 - 21431 - 21592 - 22895 FAX. 22627 - 20053

FRAKSI PARTAI GOLKAR
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

SURAT - KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP-01 /FFG/IX/1999

Dasar : Surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No:161/162/DPRD/99 tanggal 24 September 1999 Tentang Pengajuan Nama-nama Calon Anggota MPR-RI Utusan Daerah

Pertimbangan : Untuk memenuhi permintaan tersebut diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Fraksi Partai GOLKAR Untuk Calon Anggota MPR-RI Utusan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepada nama-nama sebagai berikut :

1. LEWIS KDR, BBA
2. KAMSYIAH A. MAMAT
3. ABDUL RASYID AS
4. MARUAHAL SILALAH, SmHK
5. YAN RATIH, Bsc

Untuk diusulkan menjadi Calon Anggota MPR-RI Utusan Daerah Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai GOLKAR.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA
PADA-TANGGAL : 25 SEPTEMBER 1999

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Ketua,
H. MASRAN H. MASJUHUR, SKN

Wk. Sekretaris,
H. RUSLAN DOMOY

tidak memiliki pilihan seperti itu.

Cengkeraman Abdul Rasyid terhadap masyarakat itu tercipta karena kemampuannya memanfaatkan ketiadaan hukum dan korupsi. Rakyat awam tidak akan memiliki masa depan bila anarki semacam itu dibiarkan merajalela.

Tampilnya Rasyid

Walau ada bukti yang diberikan oleh EIA dan Telapak kepada pihak berwenang tentang aktivitasnya, Abdul Rasyid justru telah meningkatkan pengaruh dan kekuasaannya. Pada semester kedua 1999, Rasyid terus meraup keuntungan dengan merusak Taman Nasional dan menggunakan harta haramnya untuk memperkuat ambisi politiknya. Dalam pertemuan antara EIA, Telapak dan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu, Rapiuddin Hamarung, jelaslah bahwa Gubernur ditekan untuk memberikan konsesi hutan kepada Abdul Rasyid. Menyusul pertemuan Agustus 1999 ini telah terjadi kejadian-kejadian lanjutan berikut:

- Gubernur Kalimantan Tengah memberikan konsesi hutan kepada Abdul Rasyid;
- Sebuah komisi baru dibentuk oleh Gubernur untuk mengawasi pengelolaan Taman Nasional Tanjung Putting. Duduk sebagai ketua satu ialah Ruslan, saudara kandung Abdul Rasyid;
- Abdul Rasyid dicalonkan oleh partai Golkar setempat untuk menjadi anggota Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Cara khas yang digunakan oleh Tanjung Lingga untuk melegalkan kayu curian adalah membeli kayu sitaan pada pelelangan. Pada 21 September



Abdul Rasyid

photo below
Rasyid's launch ferried the forestry minister and provincial governor to a ceremony in Tanjung Putting, September 1999
Kapal milik Rasyid mengantar Menhutbun dan Gubernur Kalteng ke suatu acara di Tanjung Putting, September 1999



Destruction of Tanjung Puting



© Dove Currey – EIA/Telopak

photo above

Tanjung Lingga sawmill. Rasyid and his brother have been accused of processing 60 per cent of illegal timber in the area

Sawmill Tanjung Lingga. Rasyid dan saudara kandungnya dituduh mengolah 60 persen kayu curian di kawasan tersebut

- A new commission was set up by the Governor to oversee the management of Tanjung Puting National Park. Its first chairman was Mr Ruslan, Abdul Rasyid's brother;
- Abdul Rasyid was successfully nominated by the local Golkar party to be a regional representative in the Peoples' Consultative Assembly (MPR) – the national parliament's upper house.

A common ploy used by Tanjung Lingga to legalise stolen timber is to buy confiscated logs at auction. On 21st September illegal timber seized as a result of an enforcement operation in Tanjung Puting the previous month was auctioned. The first lot of 3,500 cubic metres was purchased for Rupiah 306 million (\$50,000) by PT Sinarut Wiryra Perkasa, part of Rasyid's business empire.⁽¹⁹⁾

Later that week a farcical tree-planting ceremony was held in Tanjung Puting, and attended by Muslimin Nasution, then the Minister of Forestry and Estate Crops, and Rapiuddin Hamarung, then the governor of Central Kalimantan. At the ceremony ten timber concessions for clear-cutting (IPKs) were given to local firms, including Tanjung Lingga. Rasyid's distinctive motor launch ferried the minister and governor to a nearby lodge for lunch, accompanied by Rasyid himself. The three men later left the park together by helicopter.⁽²⁰⁾

At the same time Rasyid's political fortunes were also prospering. In late September he was appointed as a regional representative for Central Kalimantan to the national MPR, after being nominated by the ruling Golkar Party.⁽²¹⁾ His appointment sparked

1999, kayu liar yang disita sebagai hasil operasi penertiban di Tanjung Puting pada bulan sebelumnya, telah dilelang. Tumpukan pertama sebanyak 3500 meter kubik dibeli seharga 306 juta Rupiah (US\$ 50,000) oleh PT Sinarut Wiryra Perkasa, anak perusahaan kerajaan bisnis Rasyid.⁽¹⁹⁾

Beberapa hari setelah itu, sebuah upacara penanaman – yang tidak lebih dari sebuah lelucon – diadakan di Tanjung Puting, dihadiri oleh Muslimin Nasution, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dan Rapiuddin Hamarung, Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu. Dalam upacara tersebut, sepuluh izin penebangan kayu diberikan kepada perusahaan setempat termasuk Tanjung Lingga. Kapal mewah milik Rasyid mengantar menteri dan gubernur ke sebuah tempat untuk makan siang, ditemani oleh Rasyid sendiri. Ketiga orang itu meninggalkan Taman Nasional bersama-sama dengan helikopter.⁽²⁰⁾

Pada waktu yang sama, nasib baik Rasyid dalam dunia politik tengah mekar. Pada akhir September, ia ditunjuk sebagai utusan daerah untuk Kalimantan Tengah di MPR, setelah dicalonkan oleh Golkar.⁽²¹⁾ Penunjukannya meimbulkan serangkaian protes di luar DPRD di Palangkaraya. Sebagai anggota MPR ia memiliki hak suara langsung untuk pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR.

Rasyid juga mendirikan sebuah kelompok lokal yang mengaku bekerja melindungi Tanjung Puting. Akan tetapi, kelompok yang bernama Rakyat Peduli Konservasi Tanjung Puting, semata-mata merupakan tabir bagi para cukong kayu. Seperti halnya Rasyid, para anggotanya termasuk saudara kandungnya, Ruslan, juga terlibat dalam bisnis kayu, dan Halim, pemilik bisnis sawmill yang diduga terlibat dalam pengolahan kayu curian.

Langkah Rasyid berikutnya untuk meningkatkan kekuasaannya atas Taman Nasional tampak pada bulan November, ketika Gubernur Kalimantan Tengah membentuk komisi khusus untuk mengawasi Tanjung Puting. Meskipun pengelolaan Taman Nasional tetap di bawah kontrol pemerintah pusat, komisi itu diberikan wewenang mutlak untuk mengelola dan berada di atas Polisi Hutan dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan (PKA). Orang yang ditunjuk oleh gubernur untuk memimpin komisi tersebut adalah Ruslan, kakak kandung Rasyid⁽²²⁾. Kini ia tidak lagi memimpin komisi itu.

a series of protests outside the regional parliament in Palangkaraya. As a member of Indonesia's upper house he had a direct vote in the presidential run-off on 20th October.

Rasyid also established a local group claiming to be working for the protection of Tanjung Puting. Yet the group, called The People Care for the Conservation of Tanjung Puting, was merely a front for the timber bosses and as well as Rasyid its members included his brother Ruslan, also involved in the timber business, and Halim, a sawmill owner implicated in processing stolen timber.

Further manoeuvres by Rasyid to increase his control over the park came to light in November, when the governor of Central Kalimantan established a special commission to oversee Tanjung Puting. Despite the Park's management remaining under central government control, the commission was given absolute authority to run the park and was given primacy over the national Forest Police and Conservation Department (PKA). The governor's first appointment to the commission was Ruslan, the elder brother of Rasyid.⁽²²⁾ He no longer chairs the commission.

Assault and Kidnap – the breakdown of law and order

As if to illustrate the issues raised in the EIA/Telapak report 'The Final Cut' Tanjung Lingga executives openly flaunted violence and

Penganiayaan dan Penculikan – pelanggaran hukum dan ketertiban

Seakan-akan mengilustrasikan masalah yang diangkat dalam laporan EIA/Telapak 'The Final Cut', para eksekutif Tanjung Lingga secara terbuka melancarkan tindak kekerasan dan intimidasi dengan menyerang staf EIA/Telapak pada Januari 2000. Kedua aktivis EIA/Telapak tersebut memerlukan waktu tiga hari untuk dapat keluar dengan selamat dari Pangkalanbun, walaupun para pejabat senior pemerintah dan anggota korps diplomatik sudah ikut campur tangan.

Bermula dari berkembangnya ketidaksabaran komunitas donor internasional terhadap krisis hutan di Indonesia, mendorong CGI untuk menyelenggarakan seminar khusus guna membicarakan masalah tersebut. Seminar dijadwalkan pada akhir Januari dan EIA/Telapak diundang memberikan presentasi tentang penebangan liar.

Untuk memperoleh informasi langsung tentang situasi terbaru di Tanjung Puting sebelum seminar, A. Ruwindrijarto, Direktur Eksekutif Telapak dan Faith Doherty, peneliti senior dan aktivis EIA pergi ke Taman Nasional itu. Pada awalnya mereka memperoleh berita baik. Sebagian besar kawasan Sungai Sekonyer bebas dari tumpukan kayu ilegal. Sebuah kemajuan mencolok dibanding enam bulan sebelumnya ketika setiap harinya sekitar 800 balok kayu ramin dihanyutkan lewat sungai

Tanjung Lingga executives openly flaunted violence and intimidation in an attack on EIA and Telapak staff in January 2000



Illegal log raft on the Sekonyer River, January 2000

Rakit bermuatan kayu curian di Sungai Sekonyer, Januari 2000

Destruction of Tanjung Puting

photo right

Tanjung Lingga's sawmill where the kidnapping drama began

Sawmill Tanjung Lingga, tempat drama penculikan berawal

intimidation in an attack on EIA and Telapak staff in January 2000. It took three days to gain safe passage out of Pangkalanbun for the EIA and Telapak campaigners, despite early intervention by senior government officials and members of the diplomatic community.

Growing impatience among the international donor community over Indonesia's forest crisis led to an insistence by the CGI that a special seminar be convened to discuss a range of problems. The seminar was scheduled for late January and EIA/Telapak were invited to give a presentation on illegal logging.

To obtain direct information on the latest situation in Tanjung Puting ahead of the seminar, A. Ruwindrijarto, Executive Director of Telapak, and Faith Doherty, a senior investigator and campaigner with EIA travelled to the park. Initially the news was good. The Sekonyer River area was largely free of illegal log rafts, a marked improvement from six months before when up to 800 ramin logs were moving down the river on a single day. However, documentation obtained from the Sungai Buluh Kecil area of the park showed freshly cut ramin being prepared for the sawmills. The campaigners also saw ships moored outside Kumai Bay loaded with timber.

The pair decided to assess the operations of sawmills along the nearby River Arut, known to be processing large quantities of timber stolen from the park. One of Tanjung Lingga's sawmills, PT Mendawai Putra was visited and unmarked ramin logs were seen in front of the sawmill, waiting to be processed. After requesting a meeting with Abdul Rasyid and speaking to personnel from the company, it was suggested that an appointment could be



© Dave Currey - EIA/Telapak

tersebut. Akan tetapi, dokumentasi yang diperoleh dari Sungai Buluh Kecil menunjukkan sejumlah kayu ramin yang baru ditebang sedang dipersiapkan untuk diolah. Para aktivis juga melihat kapal-kapal bermuatan kayu yang ditambatkan di luar Teluk Kumai.

Kedua aktivis tersebut memutuskan untuk menilai operasi sawmill kayu sepanjang Sungai Arut, yang dikenal memproses banyak kayu curian dari Taman Nasional. Mereka mengunjungi salah satu sawmill Tanjung Lingga, PT Mendawai Putra dan kayu-kayu ramin tak berizin terlihat di depan sawmill, menunggu untuk diproses. Ketika mereka meminta bertemu dengan Abdul Rasyid dan berbicara dengan karyawan perusahaan, disarankan agar pertemuan diatur melalui kantor Tanjung Lingga di Pangkalanbun.

Sementara kedua orang dari EIA/Telapak itu percaya bahwa pertemuan itu merupakan kesempatan untuk membicarakan masalah penebangan liar, staf Tanjung Lingga memiliki agenda tersendiri – yaitu mengintimidasi dan melakukan balas dendam.

Begitu sampai di kantor, kedua aktivis itu diajak naik ke lantai atas, ke suatu ruangan kantor. Sugianto Sabran Efendi, sepupu Rasyid, dan Een Juhaeriyah, keduanya direktur Tanjung Lingga, dengan didampingi oleh sekelompok orang tak dikenal telah menunggu di sana. Salah seorang mengatakan bahwa Rasyid sedang berada di Singapura. Sugianto langsung berteriak dan menyerang Ruwindrijarto, memukul dan menendangnya. Ia juga menyerang Doherty sampai cacat - jarinya luka parah, tendon sobek, dan persendian luka. Sampai hari ini jarinya masih cacat. Kamera dan barang-barang pribadi mereka dicampakkan ke lantai dan dihancurkan. Een Juhaeriyah turut

opposite page right and below, newspaper cuttings

News of the assault on EIA/Telapak hit the headlines

Berita tentang penyerangan aktivis EIA/Telapak menjadi Berita Utama



made through the Tanjung Lingga office in Pangkalanbun.

While the pair from EIA/Telapak believed the meeting provided an opportunity to discuss the illegal logging situation, Tanjung Lingga staff had a different agenda – intimidation and revenge.

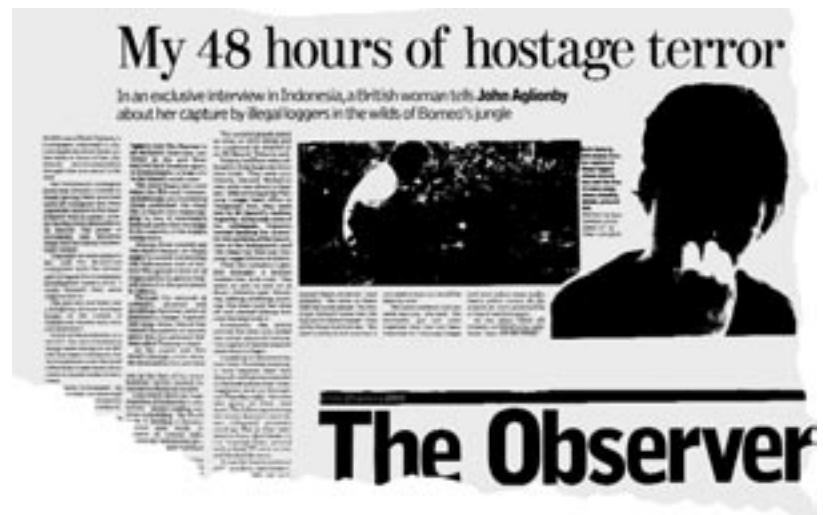
On arriving at the office the pair were led to an upstairs room where Mr Sugianto Sabran Efendi, Rasyid's nephew, and Ms Een Juhaeriyah, both directors of Tanjung Lingga were waiting, flanked by a group of unidentified men. One of the men said Rasyid was in Singapore. Sugianto immediately started shouting and attacked Ruwindrijarto, punching and kicking him to the floor. He also assaulted Doherty, seriously dislocating her finger, ripping the tendons and damaging the ligaments, leaving her to this day with a disability. Camera equipment and personal belongings were thrown around the room and smashed. Een Juhaeriyah also joined in the attack. During the beating Sugianto produced a pistol and threatened to kill Ruwindrijarto.

Rasyid's brother Ruslan, who at the time was Chairman of the Commission to manage Tanjung Puting National Park, entered the office and hit Ruwindrijarto. Shortly afterwards the local police arrived, responding to a call made by one of the Tanjung Lingga staff. The three plainclothes policemen and one uniformed officer took Ruwindrijarto and Doherty to the police station.

The pair were then taken across the road to the detectives' office to be interviewed and were allowed to make a phone call and taken to hospital. Over the next three days a tense stand-off ensued, with the detective squad protecting Ruwindrijarto and Doherty as a mob organised by Tanjung Lingga blocked their safe departure.

Despite direct orders by superior officers, local police commander Lt Col Koto refused to allow Ruwindrijarto and Doherty to leave. He accompanied Tanjung Lingga staff into the detectives' office and interrogated Ruwindrijarto and Doherty with Tanjung Lingga staff present. It was only after Indonesian NGO support and the intervention from the highest level of the Indonesian government and the British ambassador that they were escorted to the airport and able to board a charter aircraft. Attempts were made by Tanjung Lingga to stop the escape by turning off the landing lights at an airport en route to the pick-up.

After the pair had safely reached Jakarta reports came in of groups of Tanjung Lingga



menyerang. Ketika sedang memukuli, Sugianto mengeluarkan pistol dan mengancam akan membunuh Ruwindrijarto.

Saudara kandung Rasyid, Ruslan, yang pada waktu itu menjadi Ketua Komisi Pengelola Taman Nasional Tanjung Puting, masuk kantor dan memukuli Ruwindrijarto. Tak lama kemudian, polisi datang, setelah dihubungi oleh seorang staf Tanjung Lingga. Tiga polisi berpakaian preman dan seorang berpakaian dinas membawa Ruwindrijarto dan Doherty ke pos polisi.

Kedua orang itu dibawa ke kantor reserse untuk ditanyai dan diizinkan menelepon, lantas dibawa ke rumah sakit. Tiga hari berikutnya, terjadilah suasana mencekam, di mana regu reserse melindungi Ruwindrijarto dan Doherty ketika demonstrasi yang diorganisir oleh Tanjung Lingga menghadang upaya mereka keluar dari Pangkalanbun.

Walau telah ada perintah langsung dari perwira atasan, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Letkol Koto tetap melarang Ruwindrijarto dan Doherty keluar dari kota itu. Ia bersama-sama staf Tanjung Lingga masuk ke kantor reserse dan menginterogasi kedua aktivis itu. Hanya setelah adanya dukungan LSM-LSM Indonesia dan campur tangan pejabat tinggi Indonesia dan Duta Besar Inggris, mereka diantar ke bandara dan diperbolehkan naik ke pesawat. Berbagai upaya dilakukan oleh Tanjung Lingga untuk menyetop kepergian kedua aktivis itu, diantaranya dengan mematikan lampu landasan di bandara untuk menghalangi kedatangan pesawat yang datang menjemput.

Setelah kedua aktivis itu tiba di Jakarta, masuk laporan-laporan tentang orang-orang Tanjung Lingga yang berupaya menangkap siapa saja yang turut membantu EIA/Telapak, baik di Pangkalanbun dan Palangkaraya.

Tanjung Lingga staff had a different agenda – intimidation and revenge

Destruction of Tanjung Puting

© Dave Currey – EIA/Telapak



photo above
Illegal logs
Kayu-kayu curian

photo below
Log raft on the
Sekonyer River,
November 1999
Rakit kayu di Sungai
Sekonyer,
November 1999

thugs trying to round up anyone who may have worked with EIA/Telapak in both Pangkalanbun and the provincial capital of Palangkaraya.

The Aftermath

News of the assault hit the headlines in both Jakarta and abroad, forcing the authorities to look more closely at Rasyid's business dealings. Soon after the incident an inspection

Kelanjutan Peristiwa itu

Berita tentang penyerangan itu menjadi berita utama, baik di Jakarta maupun luar negeri, memaksa pihak berwenang untuk meneliti lebih jauh bisnis Rasyid. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal Kehutanan dan Perkebunan melakukan kunjungan ke Tanjung Puting dan secara terbuka mengungkapkan keterlibatan Rasyid dalam penebangan liar di Taman Nasional itu.

Menurut Suripto, Sekjen Departemen Kehutanan, tim mempunyai bukti bahwa Rasyid dan keluarganya sangat terlibat dalam pembelian kayu liar, menambahkan bahwa nilai kayu yang dicuri dari Tanjung Puting adalah tujuh puluh milyar rupiah (\$8 juta) setiap tahunnya.

Ia mengatakan: 'Rasyid tidak hanya membeli kayu curian dari Taman Nasional Tanjung Puting, tapi juga kayu ilegal dari konsesi penebangan di kawasan tersebut. Ia dan saudara kandungnya Ruslan mengolah sedikitnya 60% kayu curian di kawasan itu.'⁽²³⁾

Suripto juga berbicara tentang perlindungan politik tingkat tinggi bagi Rasyid dan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam



© EIA

team from MOFEC visited the area around Tanjung Puting and confirmed the involvement of Rasyid in the illegal logging of the park.

According to Suripto, Secretary General of MOFEC, the team had evidence that Rasyid and his family were heavily implicated in buying illegal logs, adding that the value of the timber stolen from Tanjung Puting was Rupiah 70 billion (\$8 million) every year.

He said: 'Rasyid is not only buying stolen logs from Tanjung Puting National Park but also illegal logs from logging concessions in the area. He and his brother Ruslan process at least 60 % of stolen logs in the area.'⁽²³⁾

Suripto also spoke of Rasyid's high-level political protection and the involvement of elements in the security forces in facilitating Rasyid's illegal operations. A news report in mid-February claimed that the Forestry Minister Ismail Nur Mahmudi was considering an investigation into Tanjung Lingga's activities.⁽²⁴⁾

Faced with threats to his business empire and his political power, Rasyid went on the offensive. At attempt by a team of environmental police from Jakarta to audit Rasyid's sawmills failed when they were met by an angry mob. The team had to seek refuge in the Pangkalanbun police station before returning to Jakarta.

Violence also flared up at the headquarters of the park in Kumai, when a crowd stormed the building and burned it down. Eyewitnesses report that some of the mob were paid by Tanjung Lingga.⁽²⁵⁾

Rasyid's defence over allegations of massive timber theft has been to accuse others, and he has drawn criticism from members of the Parliament's lower house, the DPR, for failing to counter the charges against him. DPR Commissions 3 (Forestry) and 8 (Environment) sent a delegation to the Park and Pangkalanbun, but Rasyid knew the plan in advance. Their report recommends returning 90,000 hectares of the park (a former forest concession) to the local community although no land claims are outstanding in this area.

Members of these commissions confirmed that Abdul Rasyid has been awarded five forest concessions, contracted by the government company Inhutani. They also confirmed that illegal ramin had been confiscated from five companies, but not from Rasyid's companies.



© Pete Knights/BDF

membantu praktek ilegal Rasyid. Sebuah berita pada pertengahan Februari menyatakan bahwa Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail mempertimbangkan suatu penyelidikan terhadap berbagai aktivitas Tanjung Lingga.⁽²⁴⁾

Menghadapi ancaman bagi masa depan bisnis dan politiknya, Rasyid balik menyerang. Sebuah tim 'polisi' lingkungan dari Jakarta untuk melakukan audit terhadap sawmill milik Rasyid gagal menjalankan tugasnya setelah dihadang aksi demonstrasi. Tim itu harus mencari perlindungan ke kantor Polres Pangkalanbun sebelum kembali ke Jakarta.

Kekerasan juga terjadi di kantor pusat Taman Nasional di Kumai. Sejumlah massa menyerbu dan membakar bangunan kantor tersebut. Saksi mata melaporkan bahwa beberapa orang dari para perusuh dibayar oleh Tanjung Lingga.⁽²⁵⁾

Pembelaan diri Rasyid atas dakwaan pencurian kayu besar-besaran adalah dengan menuding pihak lain, dan ia mendapat kritik dari anggota-anggota DPR karena tidak mampu menyangkal dakwaan terhadapnya. Komisi 3 (Kehutanan) dan Komisi 8 (Lingkungan) DPR mengutus delegasi ke Taman Nasional dan ke Pangkalanbun, namun Rasyid lebih dahulu mengetahui orang-orang yang akan berangkat ke lokasi. Laporan mereka merekomendasikan pengembalian 90.000 hektar taman (bekas konsesi hutan) kepada masyarakat setempat kendati tidak ada

There have been no efforts to halt timber theft from the Buluh Besar area of the park

Tidak ada upaya untuk menghentikan pencurian kayu dari kawasan Buluh Besar di Taman Nasional

'Rasyid and his brother Ruslan process at least 60 % of stolen logs in the area'

Suripto, Secretary General of MOFEC



photo above
Tanjung Puting's
orangutan population
is under siege
Populasi orangutan
Tanjung Puting
terkepung

Following further discussions with members of the DPR commission, they have stated that they are prepared to forward EIA/Telapak evidence of Abdul Rasyid's involvement in illegal logging to the DPR Commission 1 (Police and military).

Failure to Act

Despite the dramatic events of January 2000 and the attention focused on the plight of Tanjung Puting, Rasyid remains largely unscathed. While other sawmills in the area have been closed down, his remain operational, testament to the level of his political connections and support from senior elements in the security forces. Tanjung Lingga staff have not yet been prosecuted over the attack on EIA/Telapak personnel.

Since August 1999 the Indonesian authorities have launched sporadic actions against the illegal loggers – logging rails have been dismantled, stolen logs seized and some sawmills closed down. But most of these actions have been superficial and usually target the well-visited area of the park along the Sekonyer River, rather than more remote areas

klaim yang menonjol di kawasan ini.

Para anggota komisi tersebut mengakui bahwa Abdul Rasyid telah memperoleh lima konsesi hutan yang disetujui oleh Inhutani, sebuah perusahaan milik pemerintah. Mereka juga mengakui bahwa ramin liar telah disita dari lima perusahaan, tetapi bukan dari perusahaan Rasyid.

Menyusul pembicaraan selanjutnya dengan para anggota komisi DPR, mereka menyatakan untuk siap meneruskan bukti dari EIA/Telapak tentang keterlibatan Abdul Rasyid dalam penebangan liar ke Komisi 1 DPR (Hankam).

Gagal Bertindak

Walau terjadi peristiwa-peristiwa dramatis sepanjang Januari 2000 dan perhatian terpusat pada masalah Tanjung Puting, Rasyid tetap tak tersentuh oleh hukum. Meskipun sawmill lain di kawasan itu telah ditutup, miliknya tetap beroperasi, yang merupakan bukti betapa kuat koneksi politiknya dan betapa besar dukungan pejabat-pejabat keamanan senior.

Sejak Agustus 1999, pemerintah Indonesia melancarkan tindakan sporadis melawan penebang liar – jalur pengangkutan dibongkar,

such as the Sungai Buluh Besar and Sungai Buluh Kecil areas where the logging is more deeply entrenched.

A news report stated that the policy of giving concessions to those involved in the illegal logging has clearly failed to halt timber theft from the park. It quoted an unnamed timber businessman as saying: 'The richest ramin population is in Tanjung Puting National Park. Whoever receives the logs can easily be identified. The local forestry office and police must have known it.'⁽²⁶⁾

Loggers continue to loot timber from many areas of the park, even reaching as far as the orangutan research area around Camp Leakey, previously unscathed. In late June a witness counted 160 stolen ramin logs moving down the Sekonyer River on a single afternoon. Illegal timber continues to flood out of the area, and in June a ship carrying stolen ramin from the park was intercepted off the coast of Riau province, southern Sumatra. First reports indicate that Rasyid's Tanjung Lingga group owned the ship.

Test Case

At a meeting of a small group of CGI members and the government of Indonesia in June 2000, Tanjung Puting and the involvement of Abdul Rasyid were firmly placed back on the agenda.

The case of Tanjung Puting is seen as a test for the Government of Indonesia. Although complicated by money-politics, corruption and intimidation, it is simpler than many problems facing the forestry sector. This is a protected area and the responsibility of central government. Few contentious land claims are outstanding on the area, and much of the evidence has already been provided to the authorities.

It is time for the Government of Indonesia to show leadership and courage to honour its commitments made in February and save Tanjung Puting. Every day action is delayed sees the park being further destroyed.

kayu curian ditahan dan sejumlah *sawmill* ditutup. Tetapi, sebagian besar tindakan tersebut tidak serius dan biasanya ditujukan pada kawasan sepanjang Sungai Sekonyer, ketimbang kawasan yang lebih jauh seperti Sungai Buluh Besar dan Sungai Buluh Kecil di mana penebangan dan penimbunan kayu telah berurat akar.

Sebuah berita menyatakan bahwa kebijakan memberikan konsesi kepada mereka yang terlibat penebangan liar jelas-jelas gagal menghentikan pencurian kayu dari Taman Nasional. Laporan itu mengutip ucapan seorang pengusaha kayu: 'Populasi ramin yang paling padat adalah di Taman Nasional Tanjung Puting. Siapa pun yang menerima kayu bisa diidentifikasi dengan mudah. Kantor wilayah kehutanan setempat dan polisi pasti mengetahuinya.'⁽²⁶⁾

Para penebang terus menjarah kayu dari banyak kawasan di Taman Nasional tersebut, bahkan mencapai area penelitian orangutan di sekitar Camp Leakey, yang sebelumnya tak tersentuh. Pada akhir Juni 2000, seorang saksi menghitung 160 batang kayu ramin curian dialirkan sepanjang Sungai Sekonyer dalam semalam. Kayu curian terus mengalir keluar dari kawasan itu, dan pada bulan yang sama, sebuah kapal yang mengangkut ramin curian dari Taman Nasional dicegat di pantai Propinsi Riau, bagian selatan Sumatra. Laporan pertama menunjukkan bahwa pemilik kapal itu adalah Tanjung Lingga, perusahaan milik Abdul Rasyid.

Batu Ujian

Dalam pertemuan sekelompok kecil anggota-anggota CGI dan pemerintah Indonesia pada Juni 2000, Tanjung Puting dan keterlibatan Abdul Rasyid dicantumkan dalam agenda.

Kasus Tanjung Puting dipandang sebagai ujian bagi Pemerintah Indonesia. Kendati dibebani oleh politik-uang, korupsi dan intimidasi, kasus ini lebih mudah ketimbang banyak masalah yang menghadang dalam sektor kehutanan. Tanjung Puting merupakan kawasan lindung dan tanggung jawab pemerintah pusat. Beberapa klaim lahan yang diperdebatkan mengemuka pada kawasan itu, dan banyak bukti telah diberikan kepada pihak berwenang.

Sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia memperlihatkan kepemimpinan dan keberanian menghormati komitmennya yang dibuat pada bulan Februari dan menyelamatkan

Tanjung Puting. Setiap hari yang terlewatkan tanpa tindakan, semakin menghancurkan Taman Nasional.

The case of Tanjung Puting is seen as a test for the Government of Indonesia



© Dave Currey – EIA

photo above

Fewer than 25,000
wild orangutans
remain

Kurang dari 25.000
orangutan liar yang
tersisa

photo top right
(opposite page):

Kutai NP, East
Kalimantan, used to
be a haven for
orangutans

TN Kutai, Kalimantan
Timur, dulu pernah
menjadi tempat
berlindung bagi
orangutan

Orangutans face extinction

Illegal logging, land conversion and annual forest fires are conspiring to drive the orangutan to the very edge of extinction. Surviving orangutan populations are now confined to the islands of Sumatra and Borneo, with around 80 per cent of the remaining apes found on Indonesian territory.

At the turn of the century around 315,000 orangutans existed in the wild.⁽²⁷⁾ Today around 25,000 are believed to remain, and the long-term viability of many of the smaller remnant populations is in serious doubt. Scientists are now warning that the orangutan – Asia's only great ape and one of humankind's closest relatives – could disappear from the wild within two decades.

Present trends indicate that viable populations of orangutans in Sumatra are likely to vanish within the next ten years. In the apes' last major stronghold on the island the population has declined from 12,000 to 6,500 in a decade⁽²⁸⁾. Latest estimates from Borneo show that the fires which engulfed the area during 1997 and 1998 may have reduced the orangutan population on the island by as much as a third in less than a year⁽²⁹⁾. Overall the Borneo population is down to around 15,000,

Orangutan terancam punah

Penebangan liar, konversi lahan dan kebakaran hutan tahunan merupakan semua faktor yang mendorong orangutan ke ambang kepunahan. Populasi orangutan yang tersisa hanya terdapat di Sumatra dan Kalimantan, atau sekitar 80 persen ditemukan di wilayah Indonesia.

Proposal terbaru dari International Union for the Conservation of Nature (IUCN) akan mengangkat status populasi orangutan dari 'rentan' menjadi 'sangat terancam punah' bagi spesies di Sumatra dan 'terancam punah' bagi spesies di Kalimantan.

Pada pergantian abad ini, sekitar 315.000 orangutan hidup di alam liar.⁽²⁷⁾ Dewasa ini, diyakini tinggal 25.000 yang masih ada, dan kemungkinan hidup bagi banyak populasi yang tersebar dalam kelompok kecil pada masa mendatang sangat diragukan. Saat ini para ilmuwan memperingatkan bahwa orangutan – satu-satunya kera besar Asia dan salah satu kerabat terdekat manusia – bisa lenyap di muka bumi dalam dua dekade.

Kecenderungan terakhir menunjukkan bahwa populasi orangutan di Sumatra akan dapat punah dalam 10 tahun mendatang. Pada kawasan utama tempat hidupnya kera besar tersebut, populasinya turun dari 12.000 menjadi 6.500 dalam satu dekade⁽²⁸⁾. Perkiraan terakhir dari Kalimantan menunjukkan bahwa kebakaran yang melanda daerah itu selama 1997 dan 1998 telah mengurangi populasi orangutan hingga sepertiga dalam waktu kurang dari setahun⁽²⁹⁾. Populasi orangutan secara keseluruhan di Kalimantan turun hingga sekitar 15.000 dari jumlah 30.000 pada awal 1990-an.⁽³⁰⁾

Karena rendahnya tingkat reproduksi dan adanya bahaya selama masa pertumbuhan, para ilmuwan telah menghitung bahwa hanya ada tiga kawasan lindung di mana terdapat populasi yang memadai untuk bisa tetap hidup dalam waktu lama, yaitu: Taman Nasional Tanjung Puting (Kalimantan Tengah), ekosistem Leuser (bagian utara Sumatra) dan kompleks Betung Kerihun-Lanjak Entimau, sebuah kawasan dataran tinggi yang belum banyak dikenal yang melintasi perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Sementara ilmuwan lainnya yang pesimistis menyatakan bahwa populasi di ekosistem Leuser-lah yang memiliki harapan untuk kelangsungan hidup jangka panjang.⁽³¹⁾

© Dave Currey – EIA



© J. Williams – EIA



© J. Williams – EIA

Tanjung Puting is one of only three protected areas where orangutans have a viable future

Tanjung Puting salah satu dari tiga kawasan lindung tempat orangutan memiliki masa depan untuk kehidupannya

Orangutans face extinction

photo right

Bornean orangutans –
endangered species

Orangutan Borneo –
spesies terancam
punah

half what it was at the start of the 1990s.⁽³⁰⁾

Recent proposals from the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) will raise the status of orangutan populations from vulnerable to critically endangered for the Sumatran species and endangered for the Bornean population.

Due to its low reproductive rate and the danger of in-breeding scientists have calculated that there are only three protected areas where sufficient populations for long-term viability exist: Tanjung Puting National Park (Central Kalimantan), the Leuser ecosystem (northern Sumatra) and the Bentuang Karimun-Lanjak Entimau complex – a little known upland region straddling the border between West Kalimantan and Sarawak in Malaysian Borneo. Other scientists with less optimistic views believe that only the Leuser ecosystem population may have a long-term future.⁽³¹⁾

In Tanjung Puting, as elsewhere, the removal of food tree species, the secondary destruction of associated creepers and smaller trees, and the clearing of tracks for the removal of logs, have a direct impact on orangutan numbers in areas affected by illegal logging activity. Studies have shown that orangutan densities decline by between 60 per cent and 95 per cent in selectively logged forest, as a result of forced migration, starvation, and fatal accidents.⁽³²⁾

The impact of this logging, combined with the effects of forest fires in 1997, has resulted in a staggering decrease in numbers. Recent estimates suggest that the number of orangutans left in Tanjung Puting National Park could be as low as 500, compared with 2,000 in 1994. Even the illegal loggers are reported to have noticed fewer orangutans in the park over recent months.⁽³³⁾

Scientists working in the Leuser ecosystem state that 1,000 orangutans have been lost every year since 1998, and blame rapid habitat destruction caused by logging and land conversion. In the Gunung Leuser National Park, at the heart of the ecosystem, orangutan numbers have plummeted by 46 per cent in the last six years.

Dr Carel van Schaik, who has studied the Leuser orangutans, blames illegal logging for their present plight. He said: 'Indonesia had high deforestation rates but, until the mid-1990s, we were always optimistic that this would not endanger orangutans because there were national parks and even parts of logging concessions which were meant to be maintained as unlogged in perpetuity.'



© J. Williams – EIA

There are only three protected areas where sufficient populations for long-term viability exist

Di Tanjung Puting, sebagaimana di lain tempat, hilangnya spesies tanaman pangan, penghancuran sekunder tumbuhan jalar dan pepohonan kecil, dan pembukaan jalur untuk pengangkutan kayu, berdampak langsung terhadap jumlah orangutan di kawasan sebagai akibat kegiatan penebangan liar. Penelitian memperlihatkan bahwa kepadatan orangutan turun antara 60 persen dan 95 persen pada hutan tebangan tertentu, sebagai akibat migrasi-paksa, kelaparan dan kecelakaan.⁽³²⁾

Kegiatan penebangan, ditambah dengan akibat kebakaran hutan pada 1997, mengakibatkan penurunan populasi yang mengejutkan. Estimasi terbaru menyebutkan bahwa jumlah orangutan yang tersisa di Taman Nasional Tanjung Puting tinggal 500, dibandingkan dengan 2.000 pada 1994. Bahkan pada bulan-bulan terakhir, para penebang liar mengaku jarang melihat orang utan.⁽³³⁾

Para ilmuwan yang bekerja di ekosistem Leuser menyatakan bahwa 1.000 orangutan mati setiap tahunnya sejak 1998. Mereka menyalahkan penebangan dan konversi lahan sebagai penyebab kerusakan habitat yang cepat. Di Taman Nasional Gunung Leuser, di jantung ekosistem, jumlah orangutan menciut 46 persen dalam enam tahun terakhir.

Dr Carel van Schaik, yang mempelajari

‘Since the Suharto regime got into trouble in the mid-1990s, there has been anarchy in the forests. Laws have been flouted. A lot of logging concessions have been woefully over-logged and there has been rampant logging and clearance for oil palms in areas not meant to be logged at all, even national parks. The fires and the drought of 1998 were a double calamity.’⁽³⁴⁾

Van Schaik is warning that if the current crisis persists there will be no orangutan populations of undoubted viability left in the world within a decade.

Orangutan Taxonomy and its Relevance to Conservation

Recent data indicates that the difference between Sumatran and Bornean orangutans is as great as that between gorillas and chimpanzees.⁽³⁵⁾ This has led to agreement amongst a panel of ape experts from the IUCN that the two populations should be re-classified as separate species. The same panel also recognised the existence of three sub-species of orangutan on the island of Borneo – Eastern, Northwestern and Southwestern.

These new classifications have a real impact on the conservation status of the orangutan, as each of these species or sub-species will have a smaller and more vulnerable populations to that of the orangutan as a whole, and the loss of any one of them will represent the irreversible extinction of a separate taxonomic entity, rather than a sub-population of a larger whole. As a result, the IUCN has decided to upgrade the status of the Sumatran orangutan from ‘Vulnerable’ to ‘Critically Endangered’, while it is likely that the newly recognised Bornean species will be upgraded to ‘Endangered’.⁽³⁶⁾

If current trends continue, it seems likely that at least some of these new taxa will be extinct within only a few years of having been recognised by science.

orangutan Leuser, menyalahkan penebangan liar sebagai penyebab keadaan ini. Ia mengatakan: ‘Indonesia memiliki tingkat penggundulan hutan yang tinggi, tapi, hingga pertengahan 1990-an, kami selalu optimis bahwa keadaan itu tidak akan membahayakan orangutan karena ada Taman-Taman Nasional dan bahkan ada bagian dari konsesi hutan yang dimaksudkan sebagai hutan yang sengaja dibiarkan tidak ditebang selamanya’.

‘Sejak rezim Suharto mulai kehilangan kekuasaan pada pertengahan 1990-an, terjadi anarki di hutan-hutan. Hukum menjadi obyek cemoohan. Banyak HPH melakukan penebangan kayu secara berlebihan dan terjadi penebangan besar-besaran dan pembukaan kawasan hutan untuk kelapa sawit, di kawasan yang tidak diperuntukan untuk tebangan bahkan di Taman-Taman Nasional. Kebakaran hutan dan musim kemarau 1998 semakin menambah parah keadaan.’⁽³⁴⁾

Van Schaik memperingatkan bila krisis ini tetap berlangsung, dalam satu dekade tidak akan ada lagi populasi orangutan di dunia.

Spesies dan Sub-Spesies: Taksonomi Orangutan dan Relevansinya bagi Konservasi

Data terbaru menunjukkan bahwa perbedaan antara orangutan Sumatra dan Kalimantan adalah sebesar perbedaan antara gorila dan simpanse.⁽³⁵⁾ Kenyataan ini disepakati oleh sebuah panel ahli kera dari IUCN bahwa kedua populasi tersebut harus diklasifikasikan kembali sebagai spesies-spesies tersendiri. Panel yang sama juga mengenali keberadaan tiga sub-spesies orangutan di pulau Kalimantan – bagian Timur, Barat Laut dan Barat Daya.

Klasifikasi baru ini memiliki dampak nyata pada status konservasi orangutan, karena masing-masing spesies atau sub-spesies ini akan memiliki populasi yang lebih kecil dan lebih rentan bahaya ketimbang orangutan sebagai sebuah spesies tunggal. Hilangnya salah satu dari spesies-spesies tersebut akan menghasilkan kepunahan total dari sebuah entitas taksonomi tersendiri, ketimbang sebuah sub-populasi dari spesies orangutan. Akibatnya, IUCN memutuskan untuk menaikkan status orangutan Sumatra dari ‘rentan’ menjadi ‘sangat terancam punah’. Sementara itu, kemungkinan besar bahwa spesies baru di Kalimantan akan dinaikkan statusnya menjadi ‘terancam punah’.⁽³⁶⁾

Bila kecenderungan ini terus berlangsung, kemungkinan besar bahwa sekurang-kurangnya beberapa dari taksa baru ini akan punah dalam beberapa tahun setelah diakui keberadaannya oleh ilmu pengetahuan.

Conclusions

- The Government of Indonesia has failed to fulfil its promise to donors to immediately deal with illegal logging, especially in National Parks.
- The Government of Indonesia has failed to hold the timber baron and MPR member Abdul Rasyid accountable for illegal logging in Tanjung Puting National Park.
- Illegal logging in Indonesia's National Parks is completely out of control. In Tanjung Puting National Park commercial illegal logging continues despite local, national and international protests.
- Corrupt local, provincial and national officials are not being held accountable for their role in illegal logging.
- Illegal logging in Indonesia is on the increase. Latest reports suggest that 70 per cent of the logs supplied to the processing sector are from illegal sources. Indonesia is losing massive tax and tariff revenue from the theft of its forest resources.
- Local people, although sometimes involved in illegal logging, are losing their long-term sustenance from the forest. Vast areas of forest are being destroyed with the bulk of the revenue ending up in the bank accounts of timber barons and corrupt officials and the military.
- Countless species are threatened by illegal logging. Orangutans have declined so rapidly that their status is being reassessed as 'critically endangered' or 'endangered'. There may only be viable populations in three areas, one of which is Tanjung Puting National Park.



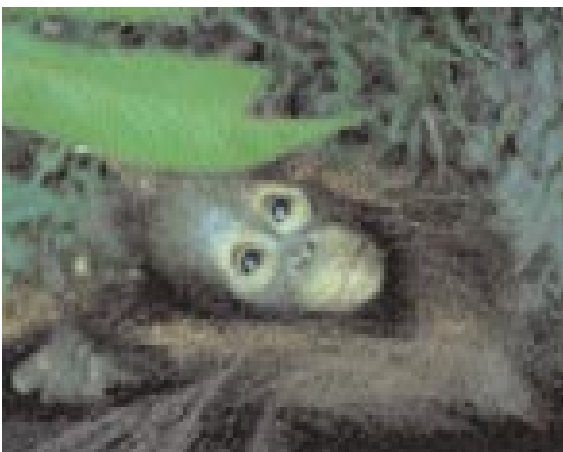
© Dave Currey – EIA

Kesimpulan

- Pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi janjinya kepada para donor untuk segera menangani penebangan liar, terutama di Taman-Taman Nasional.
- Pemerintah Indonesia telah gagal menangkap para cukong kayu dan anggota MPR Abdul Rasyid yang bertanggung jawab atas praktik penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting.
- Penebangan liar di kawasan Taman-taman Nasional di Indonesia semakin merajalela. Di Taman Nasional Tanjung Puting penebangan komersial secara liar terus berlanjut ditengah-tengah protes masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- Aparat lokal, tingkat propinsi dan nasional yang korup tidak dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan mereka dalam praktik penebangan liar.
- Penebangan liar di Indonesia semakin meningkat. Laporan terakhir menyebutkan bahwa 70% kayu gelondongan yang dipasok ke sektor pengolahan berasal dari sumber-sumber ilegal. Indonesia merugi dalam bentuk kehilangan pemasukan besar dari pajak dan tarif akibat pencurian sumber daya alam hutannya.
- Masyarakat lokal, walaupun kadang-kadang terlibat dalam penebangan liar, kehilangan daya dukung jangka panjang mereka dari hutan. Kawasan hutan yang luas dihancurkan dan sejumlah besar pemasukan negara masuk ke kocek para cukong kayu serta aparat dan pihak militer yang korup.
- Berbagai spesies yang tak terhitung terancam oleh praktik penebangan liar. Orangutan berkurang dengan sangat cepat sehingga status keberadaan mereka dipertimbangkan kembali menjadi 'sangat terancam punah' atau 'terancam punah'. Kemungkinan hanya ada tiga kawasan yang memungkinkan kelangsungan hidup populasi mereka, salah satunya adalah Taman Nasional Tanjung Puting.

Recommendations

- The Government of Indonesia must fulfil its promise to deal with illegal logging in National Parks and as a test case, **immediately stop illegal logging in all parts of Tanjung Puting National Park and close sawmills using illegal logs.**
- The Government of Indonesia must successfully conclude investigations into the activities of timber baron Abdul Rasyid and any others known to have been behind the commercial illegal logging of Tanjung Puting National Park.
- Consultation with the local community around Tanjung Puting National Park must find solutions to any legitimate land claims and seek ways to build up employment opportunities around the Park. Legal forestry and alternative opportunities for local people should be sought by the provincial government, but timber bosses who have been involved in running illegal logging operations must not be allowed to benefit.
- Corrupt local, provincial and national officials must be prosecuted for their role in illegal logging.
- The Government of Indonesia should place ramin on Appendix III of CITES with a zero quota for at least two years
- The international community must prevent consumption of illegally produced timber from Indonesia by placing the onus of proof of legality on the timber industry.
- The international donors through the Consultative Group on Indonesia must hold the Government of Indonesia to its promise to stop illegal logging, especially in National Parks.



© J. Williams – EIA

Rekomendasi

- Pemerintah Indonesia harus memenuhi janjinya untuk menangani penebangan liar di kawasan Taman-taman Nasional dan sebagai batu ujian, **harus segera menghentikan penebangan liar di seluruh kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan menutup sawmill yang mengolah kayu liar.**
- Pemerintah Indonesia harus berhasil menuntaskan penyelidikannya terhadap kegiatan cukong kayu Abdul Rasyid dan pihak lainnya yang berada dibalik penebangan komersial liar di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
- Konsultasi dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting harus menemukan jalan keluar atas setiap kasus tuntutan tanah yang sah dan mengupayakan untuk membuka peluang kerja di sekitar kawasan. Peluang kerja di sektor kehutanan yang legal dan alternatif lain untuk masyarakat setempat harus diupayakan, tetapi para cukong kayu yang pernah terlibat dalam praktik penebangan liar harus disingkirkan.
- Aparat lokal, di tingkat propinsi dan nasional harus dihukum atas peran mereka dalam praktik penebangan liar.
- Pemerintah Indonesia perlu memasukkan ramin kedalam CITES Appendix III dengan zero quota sedikitnya selama dua tahun
- Masyarakat internasional harus mencegah konsumsi kayu yang dihasilkan secara liar dari Indonesia dengan menuntut industri perkayuan untuk membuktikan legalitasnya.
- Melalui Consultative Group on Indonesia (CGI) donor internasional harus memaksa pemerintah Indonesia untuk memenuhi janjinya dalam menghentikan praktik penebangan liar, terutama di kawasan Taman Nasional.

References/Referensi

- 1) Consultative Group on Indonesian Forestry (CGIF), Jakarta, Indonesia, 1996.
- 2) Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme (ITFMP), "Roundwood Supply and Demand in the Forest Sector in Indonesia, December 1999.
- 3) Financial Times, "Indonesia's Wood-processing Industry Under Scrutiny", 17/12/99.
- 4) ITFMP 1999, op cit.
- 5) International Herald Tribune, "Indonesia's Forests Are Vanishing Faster Than Ever", 25/1/00
- 6) Bisnis Indonesia, "Penjarahan Hutan Semakin Brutal", 14/6/99.
- 7) Sunderlin, William D, "The Effects of Economic Crisis and Political Change on Indonesia's Forest Sector, 15/11/99.
- 8) Asia Pulse, "Illegal Loggers Steal Indonesia's Market Share in China", 22/6/00
- 9) National Resources Management Project, "Analysis of Natural Resource Impacts of Indonesia's Financial Crisis", 28/1/99
- 10) Agence France Presse, "EU Calls on Indonesia to Rein in Illegal Loggers", 16/12/99.
- 11) "Commitments on Forestry from the Government at CGI"
- 12) Pers comm., confidential, May 2000
- 13) Agence France Presse, "Slush Fund Set Up to Frustrate Indonesian Bribery Probe: Minister", 5/4/00
- 14) Jakarta Post, "Security Personnel Aid Timber Thieves", 15/5/00.
- 15) Reuters, "Indonesia Students Kidnap Officials in Logging Row", 4/5/00
- 16) Greenpeace, "Against the Law: The G8 and the Illegal Timber Trade", 2000.
- 17) University of Toronto G8 Information Centre.
- 18) Environmental Investigation Agency/Telapak Indonesia, "The Final Cut: Illegal Logging in Indonesia's Orangutan Parks", August 1999.
- 19) Kapos, 22/9/99
- 20) Pers comm, confidential, 27/9/99
- 21) Partai Golkar, "Fraksi Partai Golkar Tingkat I Kalimantan Tengah", 25/9/99
- 22) Pers comm, confidential, 10/11/99
- 23) Business Indonesia, "Two Sawmills Owned By General Assembly Member Buys Illegal Logs", 6/2/00.
- 24) Jakarta Post, 17/2/00
- 25) Pers comm, confidential, 17/4/00
- 26) Media Indonesia, "Logging in Tanjung Puting National Park has Reached the Core Zone", 4/1/00
- 27) The Daily Telegraph, "Fires and Logging Push Orangutans Close to Extinction, 8/5/00
- 28) Van Schaik et al, 'Dramatic decline in Orangutan Numbers in the Leuser Ecosystem', in press, 2000
- 29) Rijksen & Meijaard, 'Our Vanishing Relative', 1999
- 30) E-Wire, "World-renowned Primatologist Says Indonesian Orangutan Population May Have Declined by Half in the Past 10 Years", 7/3/00
- 31) Rijksen & Meijaard, 1999, op cit.
- 32) Van Schaik et al, 2000, op cit.
- 33) Asiaweek, 'Chainsaw Massacre' 26/11/99
- 34) Daily Telegraph, 8/5/00, op cit.
- 35) Xu & Arnason 'The Mitochondrial DNA Molecule of Sumatran Orangutan and a Molecular Proposal for Two (Bornean and Sumatran) Species of Orangutan', J Mol Evol, 1996; Janczewski et al 'Molecular Genetic divergence of Orangutan Subspecies Based on Isozyme and Two Dimensional Gel Electrophoresis', Jnl of Heredity, 1996
- 36) Russell A Mittermeier, pers comm to the Orangutan Wkg Grp, 2000; Conservation International, Press release, 2000. Sub-species definitions after Groves, C et al 'Unfinished business: Mahalanobis and a clockwork orang', Jnl of Hum Evol, 1992



telapak
INDONESIA

EIA US
PO Box 53343,
Washington DC 20009
Tel (1) 202 483 6621
Fax (1) 202 986 8626
e-mail: EIAgency@email.msn.com

EIA UK
69-85 Old Street,
London, EC1V 9HX
Tel +44 (0)20 7490 7040
Fax +44 (0)20 7490 0436
e-mail: info@eia-international.org

TELAPAK
JL. Sempur Kaler No. 16
BOGOR 16154, INDONESIA
Tel +62 251 320792
Fax +62 251 351069
e-mail: telapak@indo.net.id

www.eia-international.org

This report was written by Julian Newman, Dave Currey and Sam Lawson.
Edited by Dave Currey and Hapsoro.

Translation by Maria Adriana Sri Adhiati.

Design by Clare Mellor at Full Stop.

Many thanks to Brian Emmerson and all at Emmerson Press
for the printing of this report (Emmerson Press tel: 01926 854400).

Printed on 100% recycled paper.
Photo on front cover © Dave Currey/EIA

EIA would like to thank the following organisations for their invaluable support;
Barbara Delano Foundation, John Ellerman Foundation, Rufford Foundation,
Sustainable Solutions, Josh Mailman, Fast Frame (Rugby)
and The Framing Centre (Croydon).

EIA/Telapak also wish to thank all those individuals and
organisations who for their own safety we cannot name.